

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmosudirdjo, Prajudi, *Perizinan dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSHFakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. II, PT. RinekaCipta, Jakarta.
- Didik Mohamad Sodik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- G. Kuntana Magnar. 1983. *Pokok-pokok Pemerintah Daerah Wilayah Administratif*, Armico, Bandung.
- H.R.W. Gokkel dan N. Van der Wal, *Juridisch Latijn*, H.D. Tjeenk Willink, Groningen. 1971. diterjemahkan oleh S. Adiwinta, *Istilah Hukum: Latin – Indonesia*, Intermasa, Cet. Kedua, Jakarta.
- Hadjon, Phillipus M., 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- HR, Ridwan. 2007 *Hukum Administrasi Negara*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Kranenburg. 1980. *Ilmu Negara Umum*, Diterjemahkan oleh Tk. B. Sabaroedin, Pradnya Aramita, Cet. Kesebelas, Jakarta.
- Lubis, M. Solly. 1983. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung.
- Moenta, Andi Pangerang. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers,, 2019.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Murhani, Suriansyah. 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Pudyatmoko, Sri, 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, Pustaka Setia.
- Soehino.1993. *Ilmu Negara*, Liberty, Cet. Ketiga, Yogyakarta.
- Soehino.1998. *Hukum Tata Negara (Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sulaiman, King Faisal. 2014. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Utrecht, E. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

JURNAL

- Aditia Syaprillah. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 1. Nomor 1 Oktober 2016.
- Arini Nur Annisa. DII, 2022, Government Supervision Of The Rights Fulfillment Of Housed Workers In The Transition Period, Awang Long Law Review, Vol. 5, No. 1 November
- Arief Kresna dan Juni Ahyar. "Pengaruh Physical Distancing dan Social Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik". *Jurnal Syntax Transformation*. Vol. 1 Nomor 4 Juni 2020.
- Eka Ardiansyah Putra. 2017. Pengawasan DPRD terhadap Pemerintahan Daerah dalam Menjalankan Otonomi Daerah (Studi di DPRD Kabupaten Rokan Hulu). (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Emmy Latifah dan Moch Najib Imanullah, "Applying Precautionary Principle in Fisheries Management", *Jambe Law Journal*, Vol. 01 No. 01, 2018

- Enny Umronah. "Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)". Jurnal Legal Spirit. Vol. 4. Nomor 1 2020.
- Indra Hariyanto. 2015. "Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta". Skripsi. Sarjana Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Marce Sile Palete. 2014. "Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Mustafa Bola, Muhammad Ashri, Zulifli Aspan, Muh Ilham Arisaputra, Romi Librayanto, Eka Merdekawati Djafar, dan Dian Utami Mas Bakar. "Pembinaan Kesadaran Hukum Bagi Anak dan Remaja". Jurnal Perspektif Hukum. Vol. 16 Nomor 2, November 2016.
- Nur Rohim Yunus dan Annisa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19". Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7. Nomor 3 Tahun 2020.
- Picta Dhody Putranto. 2010. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal Di Balai Pemasyarakatan Surakarta". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta.
- Putri Eka Zaltina. 2018. "Pelibatan Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Secara Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Siti Nur Aulia Insani. 2019. "Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin. Makassar.

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

- Sukardi. 2009. *Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibatnya*, (Disertasi).
Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Tri Yunita Indah Lestari. 2019. "*Model Pembinaan Terhadap Narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang*".
Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah. Jakarta.

SURAT KABAR

<https://mediaindonesia.com/read/detail/316330-140-napi-asimilasi-kembali-berulah> (Koran *Online*) diakses pada 12 November 2020

INTERNET

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI,
"Temu Kenal Citra Hukum dan Penerapan Azas-azas Hukum
Nasional", Rumusan Hasil Seminar dalam Majalah Hukum
Nasional, Edisi Khusus No. 1 tanggal 22 – 24 Mei 1995.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba. 2017. *Sejarah
Pemasyarakatan*. diakses dari
lapassalemba.kemenkumham.go.id pada tanggal 12 November
2020.
- LIPI, 30,4% Terumbu Karang Rusak, sumber:
<http://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/liputan-media/146-lipi-30-4-persen-terumbu-karang-rusak> data akses 06 Januari 2023
- Mulyana, Yaya. 2005. *Pengelolaan Terumbu Karang*. Prosiding
Seminar Transplantasi Karang.
([https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/42252/prosiding%20seminar%20transplantasi%20karang4.pdf?sequence=1 &isAllowed=y](https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/42252/prosiding%20seminar%20transplantasi%20karang4.pdf?sequence=1&isAllowed=y)) Diakses tanggal 24 Maret 2022.
- Putri, Nurfadrijin Gabriella Junarvie, Andi Pangerang Moenta, and Achmad Ruslan. "Pelaksanaan Pengawasan Atas Penangkap Ikan yang Dapat Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan." *PETITUM* 9.2 (2021): 88-99.

PERATURAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1035).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209).
- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).